

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang hingga kini masih tergolong tinggi [1]. Selain faktor ekonomi, kondisi kemiskinan juga membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Ketidakstabilan ekonomi turut memperburuk situasi tersebut sehingga banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seseorang atau sebuah rumah tangga dikategorikan miskin apabila kondisi kehidupannya sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan [2]. Banyak keluarga juga memiliki kendala akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 26,36 juta jiwa atau 9,57 persen pada September 2022 [3]. Tren penurunan serupa juga terlihat di Kabupaten Tuban menurut hasil Susenas tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 178,05 ribu jiwa atau 15,02 persen, dan menurun menjadi 177,25 ribu jiwa atau 14,91 persen pada tahun 2023 [4]. Meski demikian, Kabupaten Tuban masih berada dalam jajaran lima besar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama setelah bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan penyaluran bantuan sosial kepada rumah tangga miskin berjalan tepat sasaran. Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa

bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan secara akurat [5]. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan beberapa bentuk intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan [6]. Namun, proses pendataan ini kerap tidak berjalan optimal karena masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pengolahan data, serta berbagai kendala akses informasi [7]. Kondisi tersebut sering menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mendukung pemerintah desa dalam mengelola data secara lebih akurat dan efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, aktivitas pengolahan data rumah tangga miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi rumah tangga miskin dan menyalurkan bantuan dengan sasaran yang lebih akurat.

Untuk memastikan penentuan rumah tangga miskin berjalan lebih efektif dan efisien, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang membantu proses pengambilan keputusan secara objektif. SPK merupakan sistem berbasis komputer yang berfungsi mendukung proses penilaian dengan menggunakan metode analitis tertentu. Dalam konteks penentuan rumah tangga miskin, SPK dapat mengotomatisasi pengolahan data berdasarkan kriteria kemiskinan sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat menentukan rumah tangga yang benar-benar membutuhkan bantuan berdasarkan analisis yang lebih sistematis.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai sistem pendukung keputusan, salah satu studi dilakukan oleh Pandu dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima BLT Menggunakan Metode SAW” [8]. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi berbasis metode SAW dapat digunakan untuk membantu menentukan penerima BLT, dan proses perhitungannya memberikan hasil yang konsisten serta efektif dalam menyeleksi penerima bantuan. Penelitian lain oleh Pasaribu dan Darussalam dengan judul “Komparasi Metode *Simple*

*Additive Weighting* dan *Metode Weighted Product Web Based* untuk Menentukan Siswa Berprestasi" [9] juga menunjukkan bahwa metode WP memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi serta lebih sesuai digunakan sebagai alat pendukung keputusan dalam menilai prestasi siswa.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penulis melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk sistem dengan judul "Uji Sensitivitas Metode *Simple Additive Weighting* dan *Weighted Product* dalam Penentuan Rumah Tangga Miskin".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dan *Weighted Product* (WP) dalam menentukan rumah tangga miskin?
2. Bagaimana pengaruh uji sensitivitas pada metode SAW dan WP terhadap hasil penentuan rumah tangga miskin?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah sistem untuk menguji sensitivitas metode SAW dan WP dalam menyelesaikan permasalahan penentuan rumah tangga miskin.
2. Menentukan metode yang lebih berpengaruh dalam penentuan rumah tangga miskin berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, yaitu menambah wawasan dalam bidang SPK, khususnya mengenai metode SAW dan WP, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan analisis sensitivitas untuk penentuan rumah tangga miskin.
2. Manfaat praktis, membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin dengan lebih akurat dan sistematis, serta mempermudah proses pengolahan dan analisis data penerima bantuan. Selain itu, penelitian

ini memberikan rekomendasi mengenai metode yang lebih efektif berdasarkan sensitivitas terhadap perubahan bobot kriteria.

3. Bagi masyarakat, membantu penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, mengurangi potensi kesalahan atau ketidakadilan, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan sistem yang lebih transparan dan efisien.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini menetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Kriteria yang digunakan dalam proses penilaian mengacu pada hasil pemilihan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak ahli di Dinas Sosial P3A Kabupaten Tuban, 8 kriteria yang digunakan adalah tempat tinggal, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, status kepemilikan rumah, penerangan rumah, transportasi, aset yang dimiliki, dan kondisi rumah.
2. Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan di Balai Desa Prunggahan Kulon, Kabupaten Tuban.
3. SPK dalam penelitian ini menggunakan metode SAW dan WP untuk menentukan rumah tangga miskin.